

Makhluk Nyata Dunia Maya: Fenomena Alienasi Diri Para Non-Biner sebagai Dampak Ketaksaan Gender

Dinara Tsafina Asmarani¹; Vania Pramudita Hanjani²
Universitas Diponegoro^{1,2}
dinara@students.undip.ac.id¹; vaniaphanjani@gmail.com²

Abstract

The phenomenon of self-alienation that is rampant in marginalized communities has become an issue of great concern. This bitter reality confirms the values and norms of heteronormativity that ensnare individuals with identities outside the binary in invisible shackles. In this case, the shackles do not come without cause; the concepts of shame and institutional power are believed to be the underlying factors of self-alienation. Through a comprehensive review of the literature, this research utilizes Michel Foucault's theory, which reveals that the body will always obey because there is power that supervises and regulates it. Therefore, we find a struggle of the complexity of problems in societal dynamics and heteronormativity. This research uses participant observation techniques on a number of individuals with gender identities outside the binary spectrum, so that it will present varied perspectives and perceptions of the societal norms formed by the awareness of non-binary gender identities. The research found that the phenomenon of self-alienation among non-binary individuals is largely motivated by conservatism and inherent heteronormativity, leading to shame and bodily conformity. The combination of these reasons transforms into a binding factor that increasingly entangles individuals, thus causing the silencing of self-identity.

Keywords: self-alienation, heteronormativity, gender identity, non-binary

Abstrak

Fenomena alienasi diri yang marak terjadi di kelompok masyarakat yang termarginalisasi telah menjadi isu yang penuh sorotan. Realitas pahit ini menegaskan nilai dan norma heteronormativitas yang menjerat individu dengan identitas di luar biner dalam belenggu tidak kasat mata. Dalam kasus ini, belenggu tersebut datang bukan tanpa sebab, konsep rasa malu dan kekuasaan institusi diyakini menjadi faktor yang melatar-belakangi terjadinya alienasi diri. Melalui peninjauan literatur secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori Michel Foucault yang mengungkap bahwa tubuh akan selalu patuh karena ada kekuasaan yang mengawasi dan mengaturnya. Oleh karena itu, kami menemukan adanya pergulatan kompleksitas permasalahan dalam dinamika sosial-masyarakat dan heteronormativitas. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan terhadap sejumlah individu dengan identitas gender di luar spektrum biner, sehingga akan menyajikan sudut pandang dan persepsi yang bervariasi mengenai norma masyarakat yang terbentuk akan adanya kesadaran identitas gender non-biner. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa fenomena alienasi diri yang terjadi di kalangan individu non-biner secara garis besar dilatar-belakangi oleh konservatisme dan heteronormativitas yang melekat sehingga memunculkan rasa malu dan kepatuhan tubuh terhadapnya. Kombinasi dari beberapa alasan tersebut menjelma sebagai faktor pengikat yang semakin menjerat individu, sehingga menyebabkan pembungkaman identitas diri menjadi semakin kuat.

Kata Kunci: alienasi diri, heteronormativitas, identitas gender, non-biner

1. Pendahuluan

Konsep identitas gender sering kali disalah-pahami dan dianggap sama dengan jenis kelamin biologis yang hanya didasarkan pada jenis kromosom, hormon, organ reproduksi, dan alat kelamin. Kenyataannya, kompleksitas identitas gender memiliki fungsi dan peran lebih dibanding hanya sebagai label pembeda di antara dua jenis kelamin biologis, sebab gender turut meliputi perasaan dan karakteristik individu dalam mengekspresikan dirinya. Berkenaan dengan hal tersebut, sejumlah pakar gender telah merumuskan gender sebagai sebuah konstruksi sosial. Dengan kata lain, identitas tersebut lahir melalui dinamika interaksi sosial yang dikonstruksi, maka identitasnya tidak bersifat statis (Berkowitz et al., 2010). Selain itu, terdapat konsep *doing gender* milik West dan Zimmerman (1987) yang menyebutkan bahwasanya gender lebih dari sekadar siapa dirinya, melainkan turut terdiri atas serangkaian persepsi, perilaku, dan tindakan yang dilakukan manusia secara berulang dalam interaksi sosial yang merepresentasikan tampilan tertentu sebagai ekspresi dari sifat maskulin atau feminin.

Miskonsepsi-miskonsepsi yang selama ini beredar dan dijalankan masyarakat telah menghasilkan segmentasinya tersendiri, lantaran konsep yang dianggap benar adalah ketika seseorang terlahir sebagai laki-laki harus mengekspresikan dirinya secara maskulin dan harus tertarik kepada perempuan; sedangkan, yang terlahir perempuan harus mengekspresikan diri secara feminin dan tertarik kepada laki-laki. Kriteria-kriteria dalam segmentasi di atas diistilahkan sebagai *cisgender*, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi identitas gendernya sesuai dan bertepatan dengan jenis kelamin biologisnya (Fiani & Han, 2018). Dinamika masyarakat yang hanya mengakui eksistensi *cisgender* dan menganggap bahwa manusia hanya dikotak-kotakan menjadi dua jenis atau dikotomi, justru menjadikan bagian masyarakat yang berada di luar dikotomi tersebut merasa salah dan tidak pada tempatnya. Hal tersebut dikarenakan timbul perasaan bahwa identitas dirinya tidak valid dan tidak diberi ruang untuk mengidentifikasi dirinya secara leluasa seperti para *cisgender*. Oleh sebab itu, istilah-istilah payung mulai bermunculan untuk menaungi masyarakat yang tidak berada di spektrum biner atau non-heteronormatif, seperti *genderqueer* dan non-biner. Menurut Richards et al. (2016), *genderqueer* merupakan istilah yang dipakai untuk memayungi identitas-identitas gender lain yang lebih kompleks dan tidak hanya terpaku pada salah satu dikotomi gender, di dalamnya termasuk pula non-biner. Maka dari itu, istilah tersebut merujuk pada definisi terhadap seseorang yang tidak mengidentifikasi gendernya sebagai salah satu dari dua kategori identitas biner yang umum dijumpai pada masyarakat heteronormatif. Dengan kata lain, seseorang bisa saja gabungan dari keduanya, bergantian di antara keduanya, gabungan lebih dari dua identitas gender, ataupun tidak memiliki gender sama sekali.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa kemunculan identitas gender biner tersebut tidak disengaja. Bermula dari zaman berburu dan meramu, ciri fisik yang menyertai fungsi biologis manusia secara tidak disengaja menciptakan lingkup kekuasaan atas ranah domestik dan publik dalam relasi gender. Hal ini berkaitan erat dengan konsep *female-nature* dan *male-culture* milik Ortner (1974) yang menjelaskan bahwa fungsi biologis perempuan untuk bereproduksi menempatkan mereka berada lebih dekat dengan

alam, sementara laki-laki berperan dalam mengisi ranah publik yang menghasilkan kebudayaan. Kemudian, aspek-aspek tersebut menjadi landasan tercetusnya nilai-nilai moralitas seksual, yaitu maskulinitas dan femininitas. Walaupun sejatinya maskulinitas dan femininitas juga difaktori oleh konstruksi sosial dan kultur, kehadirannya pertama kali masih didasarkan pada dikotomi jenis kelamin biologis. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut melanggengkan penyesuaian perilaku manusia berdasarkan norma-norma heteronormatif yang masih berlaku hingga dewasa ini.

Seiring berjalannya waktu, rasa malu tumbuh menjadi faktor yang melatarbelakangi penyesuaian perilaku berdasarkan norma dan kultur yang berlaku. Maka, kelanggengan moralitas seksual turut disebabkan oleh latar belakang pengonstruksianya sebagai pelindung dari rasa malu. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Davies (2017), ia menyatakan bahwa kontrol seksualitas, terutama di Indonesia, didominasi oleh kinship of shame. Oleh karena itu, timbul kepatuhan-kepatuhan dalam pola perilaku masyarakat untuk mengikuti serta mencocokkan nilai maskulinitas dan femininitas agar selaras dengan jenis kelamin biologisnya, lantaran harus menyesuaikan diri dengan norma dan kultur setempat. Hal tersebut tentunya bertujuan agar dirinya terhindar dari stigma-stigma negatif yang sering kali disematkan pada individu yang melawan arus atau tidak berada dalam spektrum gender biner. Akibatnya, identitas gender yang terbentuk berdasarkan jenis kelamin biologis ini telah menjadikan tubuh manusia sebagai instrumen dari keberlangsungan kontrol sosial yang cenderung bersifat eksklusif dan kaku dikarenakan tidak dapat menerima golongan di luar norma yang berdasar pada gender biner.

Konservatisme yang terdapat pada moralitas seksual mempersempit ruang gerak individu dalam mengekspresikan siapa dirinya. Tidak hanya membatasi para non-biner, nilai dan norma tersebut juga menyulitkan orang yang terlahir sebagai interseks. Pengklasifikasian interseks ditujukan kepada orang yang terlahir dengan organ reproduksi yang tidak sesuai dengan model gender biner, yaitu perempuan atau laki-laki (Wieringa, 2017). Masalah utama yang dihadapi para interseks tidak hanya sebatas masalah-masalah klinis, namun juga moralitas, norma, dan stigma masyarakat. Para non-biner dan interseks juga dipaksa menghadapi ke-heteronormativitas -an dalam hubungan seksual, yaitu hubungan yang normal adalah hubungan yang melibatkan penis dan vagina. Fenomena ini sedikit banyak dapat dipahami melalui kacamata Foucault sebagai representasi nyata dari konsep docile bodies miliknya. Foucault (1995) menyoroti kepatuhan tubuh seseorang dipengaruhi oleh adanya policy of coercions yang mengambil alih tubuh manusia, akibatnya terdapat manipulasi dalam tindak tanduk yang telah atau akan dilakukan. Maka dari itu, alih-alih menunjukkan jati dirinya, para non-biner yang meyakini dirinya tidak memenuhi nilai-nilai maskulinitas dan femininitas sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, justru memilih untuk membungkam dan mengasingkan identitas gender mereka yang sebenarnya. Lantas, bagaimana mereka menunjukkan identitas diri dan gendernya? Oleh karena itu, melalui tulisan ini, kami akan menilik keselarasan antara studi kasus yang ada dengan teori relasi kuasa

milik Foucault (1978) yang menekankan pada anggapan bahwa tubuh merupakan wujud nyata atas suatu kekuasaan.

2. Metode

Penelitian ini dikembangkan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis suatu contoh studi kasus dan kajian pustaka, serta menggunakan etnografi sebagai desain penelitiannya. Menurut Creswell (2012), desain etnografi merupakan sebuah prosedur dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan unsur-unsur kultural suatu kolektif yang berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karenanya, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik observasi partisipatif dan wawancara semi terstruktur dengan sejumlah informan sehingga data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan tajam.

Penentuan informan dilakukan menggunakan salah satu teknik dalam non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Dengan kata lain, informan telah secara sengaja ditentukan melalui sejumlah pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari anggapan bahwa informan tersebut dinilai sebagai orang yang paling mengetahui mengenai situasi sosial yang akan kita teliti, dan/atau merupakan sosok penting sehingga memudahkan keberlangsungan penelitian (Sugiyono, 2015). Berkenaan dengan itu, observasi partisipan dilaksanakan penulis selama lebih dari tiga tahun, sehingga penulis telah menjalin hubungan kerabat yang terbilang dekat dengan kedua informan sebagai bentuk studi kasus. Secara spesifik, penelitian ini dilaksanakan secara hybrid, di mana penulis dan informan tidak hanya berinteraksi di dunia nyata, namun juga di dunia maya.

Selanjutnya, analisis awal yang disampaikan dalam penelitian ini melalui hasil telaah kajian pustaka yang menyoroti implikasi-implikasi kebudayaan dan partisipasi masyarakat dalam peran sertanya yang memengaruhi tindak tanduk para non-biner untuk mengekspresikan jati dirinya. Berkenaan dengan konteks tersebut, untuk memberikan gambaran-gambaran dan pemahaman mengenai kompleksitas relasi di antara genderqueer, masyarakat awam, dan heteronormativitas. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks ini telah dikumpulkan untuk kemudian dijadikan tolok ukur dalam menentukan gap penelitian.

Literatur yang secara spesifik membahas kompleksitas relasi tersebut ditulis oleh Inesty Kartikaningdryani pada tahun 2019 dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul “Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma” dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi. Kartikaningdryani menekankan fokus penelitiannya pada diskriminasi dan kekerasan yang dialami kelompok transgender terutama waria, hanya karena dianggap melanggar nilai-nilai heteronormativitas. Dalam penelitian tersebut, Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitiannya karena merupakan destinasi favorit untuk disinggahi waria. Lebih lanjut, Kartikaningdryani menyoroti pola kehidupan waria yang kompleks. Permasalahan yang kerap kali dihadapi para waria adalah pandangan abnormal yang disematkan padanya oleh lingkungan sekitar, bahkan keluarga terdekat, sehingga banyak di antaranya

yang memutuskan untuk pergi mencari suaka dan membentuk komunitas bersama para waria lainnya. Di sisi lain, Kartikaningdryani menemukan masalah-masalah baru yang tidak ada habisnya membebani para waria, yaitu masalah finansial dan kemunculan peraturan daerah yang diskriminatif. Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa kehidupan para genderqueer tidak dapat dielakkan dari nilai-nilai heteronormativitas yang melekat pada masyarakat awam, sehingga upaya mereka untuk mencoba menyuarakan identitasnya akan selalu memiliki celah untuk digagalkan.

Dalam penelitian ini, kami tidak hanya memperluas cakupan topik, namun fokus penelitiannya turut berpindah pada pengalaman individu non-biner dalam menghadapi nilai dan norma heteronormatif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bentuk resistansi waria telah diungkap secara mendalam oleh Kartikaningdryani, penelitian ini akan mengkaji bentuk resistansi para non-biner sebagai dampak ketaksaan identitas gender dan kelanggengan nilai-nilai heteronormatif di lingkungan sekitar. Dengan demikian, kedudukan tulisan ini akan menjadi kajian baru menyoal kompleksitas antara kesadaran akan kuasa tubuh yang berhadapan dengan realitas heteronormatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Selayang Pandang Konsep Gender dan Seksualitas di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini norma-norma seksualitas di Indonesia masih bercorak heteronormatif yang cenderung tidak inklusif terhadap identitas gender di luar spektrum biner. Di dalamnya, dielu-elukan bahwa konsep kehidupan yang ideal adalah berperilaku feminin atau maskulin menyesuaikan jenis kelamin biologis, kemudian berkeluarga (pernikahan hetero) dan memiliki anak keturunan. Namun nyatanya, kehadiran dikotomi identitas gender berdasarkan aspek-aspek fisiologis tidak serta-merta muncul dan diterapkan sejak awal Nusantara berdiri. Pemahaman terkait keberagaman identitas gender rupanya telah lebih dahulu hadir di kalangan masyarakat Bugis dengan konsep lima identitas dan peran gender. Nurohim (2018) menyebutkan identitas dan peran gender tersebut terdiri dari *Makkunrai* (perempuan), *Orowane* (laki-laki), *Calabai* (laki-laki feminin), *Calalai* (perempuan maskulin), dan *Bisu* (gabungan laki-laki dengan perempuan). Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia menghadapi pergulatan dan benturan dengan konsep-konsep keagamaan yang silih berganti masuk dan terserap dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga banyak nilai-nilai kebudayaan yang terdiskriminasi, termasuk konsep identitas dan peran gender di suku Bugis ini.

Masuknya kolonialisme dan perdagangan internasional yang menyinggahi Indonesia turut serta membawa ajaran-ajaran agama samawi, yaitu Islam dan Kristen. Perspektif konsep gender yang terdapat dalam ajaran agama samawi memiliki pengaruh besar yang berdampak pada perubahan signifikan terhadap keberagaman gender yang telah lebih dulu hadir, sebagaimana dikarenakan konsep ajarannya hanya mengusung gender biner semata. Zubeir (2012) menyebutkan bahwa beberapa ayat pada surah dalam kitab suci Alquran kurang lebih memiliki inti bahwa Allah SWT menciptakan laki-

laki dan perempuan yang saling berpasang-pasangan, supaya mereka dapat melahirkan banyak laki-laki dan perempuan lainnya. Selaras dengan Alquran, Wospakrik (2013) menyebutkan dalam ajaran Kristen turut memercayai bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin demi keberlangsungan manusia, Ia merujuk pada ayat 28 di Kitab Kejadian pasal 1 yang berbunyi “beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Dalam konteks ini, tafsir teks-teks keagamaan tersebut kerap kali dijadikan pembenaran atas stigmatisasi yang dilayangkan kepada para *genderqueer*, sehingga gagasan biner dan dikotomi dalam identitas gender berangsur-angsur mengakar pada kehidupan masyarakat Indonesia

Nilai-nilai dalam moralitas seksual berbasis heteronormativitas dijunjung tinggi, sebagaimana hal tersebut dinilai sesuai dengan kodrat lahiriah manusia; sempurna tanpa penyimpangan. Davies (2010) menyebutkan bahwasanya heteronormativitas merupakan norma yang berlaku dalam wacana publik dengan landasan konsep pemisahan tubuh laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan itu, penyuaran norma gender heteroseksual sering kali digaungkan oleh pemerintah dan instansi di bawahnya, terlebih melalui keberadaan dan pemberlakuan produk-produk hukum yang terkesan mendiskriminasi kelompok gender di luar spektrum biner. Sejumlah peraturan yang berada di tingkat nasional maupun daerah cenderung memihak pada nilai dan norma heteronormatif, salah satunya terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur masalah pernikahan seorang pria dan wanita. Secara gamblang, pasal tersebut menyatakan bahwasanya pernikahan yang sah hanyalah pernikahan heteroseksual semata, sementara pernikahan non-heteroseksual tidak termasuk dalam hitungan pernikahan yang dapat disahkan oleh negara. Parker (2009) telah menegaskan bahwa keberadaan seksualitas di Indonesia era kontemporer selalu berperan sebagai wacana moral, akibatnya ada perasaan keharusan yang timbul pada otoritas publik untuk melarang dan menjadi proteksionis akan hal tersebut.

Keberadaan produk hukum berwujud peraturan perundangan dan kebijakan yang cenderung menyudutkan tersebut telah melegitimasi stigma-stigma buruk masyarakat awam mengenai *genderqueer*. Akibat dari adanya stigmatisasi tersebut, banyak perlakuan diskriminatif yang dikhawatirkan dapat terjadi atau bahkan telah dirasakan oleh para *genderqueer*. Umumnya, diskriminasi tersebut berupa diskriminasi sosial yang mewujud dalam bentuk tindak kekerasan psikis maupun fisik, seperti cemoohan dan pelecehan. Kendati demikian, sejumlah sejarah kelim kriminalitas di Indonesia sedikit banyak ditorehkan oleh stigmatisasi berujung diskriminasi terhadap mereka yang termasuk dalam golongan marginal non-heteronormatif. Ariyanto & Triawan (2008) menggambarkan beratnya tekanan nilai-nilai heteronormatif yang memaksa individu untuk berada dalam spektrum gender biner tersebut melalui pengisahan peristiwa tragis yang dirasakan dan dilalui oleh komunitas *Bisu* di Sulawesi Selatan sepanjang Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, para *Bisu* tersebut menjadi target dalam aksi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kahar

Muzakkar, sedangkan pada masa Orde Baru terdapat Operasi Taubat (Operasi Toba). Keironisan dalam dua peristiwa besar tersebut mencuat seketika diketahui fakta bahwa keduanya memiliki pola yang sama, yaitu terdapat kesamaan agenda untuk memberantas komunitas *Bisu* dengan cara pembantaian besar-besaran atau memaksa mereka memilih untuk masuk ke suatu agama tertentu dan berperilaku layaknya pria normal.

Berbicara mengenai diskriminasi, maka konsep *docile bodies* kembali dipertegas melalui adanya nilai-nilai heteronormatif yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana norma dan nilai tersebut lantas menjadi instrumen pengawasan dan kerangkeng tidak kasat mata yang memenjarakan para *genderqueer*. Selain itu, *kinship of shame* juga turut memainkan peran dalam konteks ini. Imbasnya, seseorang akan tunduk dan patuh terhadap larangan yang membawa rasa malu, seperti halnya larangan-larangan pada ranah identitas gender dan seksualitas. Walaupun pengawasan dan konsep rasa malu tersebut dicetuskan sebagai kontrol sosial untuk mengatur manusia agar tidak melewati batas, namun pada praktiknya justru melahirkan kontradiksi dan ketidak-sinambungan dalam upaya mematuhi nilai-nilai heteronormatif. Beberapa individu menilai dirinya sebagai seorang heteroseksual, tetapi di sisi lain terlibat dalam praktik hubungan seksual sesama jenis. Ironisnya, dalam beberapa kasus tidak jarang oknum yang menyangkal seksualitasnya justru mencemooh para *queer* yang berupaya mengekspresikan jati diri mereka.

3.2. Alienasi Diri sebagai Konsekuensi atas Kebebasan Berekspresi

Tiap individu seyogianya memiliki kebebasan berekspresi sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat dalam dirinya dan dapat mengekspresikan pemikiran, keyakinan, serta identitasnya secara terbuka. Penting untuk diingat pula bahwasanya prinsip-prinsip HAM turut termasuk dan diatur secara tegas oleh negara melalui keberadaannya dalam UUD 1945 pada Pasal 28A-J. Kendati demikian, terdapat kompleksitas yang dihadapi para *genderqueer* ketika ingin mengekspresikan diri mereka secara bebas dan terbuka. Masyarakat awam cenderung sering mengharuskan setiap individu untuk berperilaku dan berperan menyesuaikan gender biner yang telah ditetapkan berdasarkan jenis kelamin biologis, sehingga keberadaan sistem gender biner yang konservatif tersebut menjadi berkelanjutan. Akibatnya, stereotip yang merugikan menjadi semakin kuat eksistensinya dan membentuk lingkungan konservatif yang resistan terhadap perbedaan. Pada akhirnya, sebagian dari mereka memilih untuk mengurung identitasnya di balik ekspektasi masyarakat dan norma sosial yang telah mengakar, dibandingkan harus menghadapi tuduhan-tuduhan yang memalukan.

Terbatasnya ruang berekspresi turut melanggengkan diskriminasi bagi mereka yang memiliki identitas gender di luar biner, di mana mereka dapat menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses peluang dan pengakuan sosial yang setara. Sehubungan dengan itu, kehadiran media sosial dengan segala platformnya telah menjadi sarana terbesar bagi seluruh umat manusia untuk mengekspresikan dirinya, terlebih lagi mereka dapat membuat identitas baru yang tidak dikenali. Oleh

karena itu, platform-platform tersebut menjelma menjadi tempat aman yang menawarkan kebebasan untuk menunjukkan dan merangkul kembali jati diri mereka. Lebih jauh, media sosial memungkinkan mereka bertemu dengan orang lain yang berbagi pengalaman yang sama, sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki antara satu sama lain yang sulit ditemukan di dunia nyata karena adanya keterbatasan norma- norma umum yang mengikat.

Ironisnya, bagi para *genderqueer* tetap ada yang harus dikorbankan demi menebus kebebasan berekspresi di dunia maya yang tidak terbatas tersebut. Mereka perlu untuk tetap menekan identitasnya dan mengalienasi jati dirinya di dunia nyata, di mana hal tersebut terjadi lantaran ada realitas yang kembali dihadapi bahwa identitas tersebut tidak dapat dibawa keluar dari ranah media sosialnya. Dengan kata lain, apa yang berada di media sosial, tetap berada di media sosial. Adapun alasan yang melatarbelakangi keironisan tersebut menurut Ace dan Kafka (nama samaran) adalah sebagai berikut:

“*Preferred pronouns*¹ saya *he/they*², tapi sehari-hari biasanya pakai *she/her*³. Identitas di sana *nggak* saya bawa ke luar sosial media, lingkungan saya di *real life*⁴ cukup konservatif, saya juga *mikirin* gimana kecewanya keluarga kalau *tau I am a part of the LGBTQ+ community. A lot of people put their stereotypical high expectations on me too, so it's also pushed by the sense of obligations to make them proud, even when I have to fake or hide my true conditions.*” (Ace, 5 Desember 2023).

Terjemahan:

“Pilihan kata ganti orang ketiga atau pronomina saya adalah *he/they*, tapi sehari-hari biasanya pakai *she/her*. Identitas di sana *nggak* saya bawa ke luar sosial media, lingkungan saya di *real life* cukup konservatif, saya juga *mikirin* gimana kecewanya keluarga kalau *tau* saya merupakan bagian dari komunitas LGBTQ+. Lagi pula, banyak orang yang meletakkan harapan tinggi yang stereotipikal pada saya, sehingga hal tersebut juga didorong oleh adanya rasa kewajiban untuk membuat mereka bangga, bahkan apabila saya harus memalsukan atau menyembunyikan kondisi saya yang sebenarnya.” (Ace, 5 Desember 2023).

“*Pronouns* di *real life she/her*, tapi *my preferred pronouns are he/them. Yep*, identitasnya saya tekan karena perbedaan identitas gender seseorang masih dianggap tabu di Indonesia, sehingga saya lebih merasa aman dan nyaman jika menyembunyikan *preferred gender* saya.” (Kafka, 5 Desember 2023).

Terjemahan:

¹*Preferred pronouns* merupakan kata ganti orang ketiga atau pronomina yang dipilih dan ditentukan oleh yang bersangkutan

²*He/they* merupakan kombinasi ‘*he/him*’ dan ‘*they/them*’ dalam pengidentifikasian kata ganti orang ketiga atau pronomina yang merujuk pada identitas non-biner dengan pembawaan maskulin

³*She/her* merupakan pengidentifikasian kata ganti orang ketiga atau pronomina sebagai seorang perempuan atau pembawaan feminin

⁴*Real life* adalah kehidupan nyata

“Kata ganti orang ketiga atau pronomina saya di kehidupan nyata adalah *she/her*, tapi pilihan kata ganti orang ketiga atau pronomina saya adalah *he/them*. *Yep*, identitasnya saya tekan karena perbedaan identitas gender seseorang masih dianggap tabu di Indonesia, sehingga saya lebih merasa aman dan nyaman jika menyembunyikan pilihan gender saya.” (Kafka, 5 Desember 2023).

Berada dalam lingkungan yang heteronormatif mengharuskan Ace dan Kafka untuk lebih keras membungkam identitas gendernya di keseharian, bahkan ketika berada di dalam rumah sekalipun. Batasan-batasan dalam mengekspresikan identitas gendernya di dunia nyata diakibatkan oleh adanya jalinan keterikatan dengan orang-orang yang menjalankan dikotomi gender tersebut, yaitu keluarga dan lingkungan terdekat. Dalam kasus ini, alasan substansial bagi Ace maupun Kafka terletak pada beban moral yang diemban keduanya terhadap keluarga masing-masing yang masih berada dalam satu lingkup kehidupan yang sama. Pertimbangan yang diperhitungkan tentunya juga turut melibatkan keluarga yang bersangkutan, sebab mereka tidak ingin stigma-stigma buruk terhadap komunitas LGBT+ dan ragam identitas gender di dalamnya turut dilayangkan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Dengan berlakunya nilai-nilai konservatif dan heteronormativitas di lingkungan kehidupan mereka, maka semakin menciutkan nyali keduanya untuk menunjukkan identitas aslinya secara terbuka. Hal tersebut menjadikan keduanya memiliki potensi besar untuk mendapatkan cibiran dan cercaan dari masyarakat, bahkan dapat merambah dan menyeret pihak keluarga yang tidak terlibat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pilihan yang ditawarkan kepada keduanya hanya diam atau tidak diterima.

“I think it’s mainly because of the fear of getting rejected by society and my relatives, the fear of getting labeled as ‘abnormal’, the fear of not being able to fit in, takut dikucilkan. Saya takut image yang saya bangun hancur, takut pandangan orang ke saya berubah jadi buruk.” (Ace, 5 Desember 2023).

Terjemahan:

“Saya pikir ini terutama karena adanya ketakutan akan ditolak oleh masyarakat dan kerabat, ketakutan akan dilabeli sebagai 'tidak normal', ketakutan tidak bisa berbaur, takut dikucilkan. Saya takut citra yang saya bangun hancur, takut pandangan orang ke saya berubah jadi buruk.” (Ace, 5 Desember 2023).

“Saya menekan gender *preference* saya hanya karena moralitas, *conservativeness*, dan *heteronormativity*. Kalau *conservativeness* tidak berlaku, saya akan menyuarakan gender *preference* saya.” (Kafka, 5 Desember 2023).

Terjemahan:

“Saya menekan preferensi gender saya hanya karena moralitas, konservativitas, dan heteronormativitas. Kalau konservativitas tidak berlaku, saya akan menyuarakan preferensi gender saya.” (Kafka, 5 Desember 2023).

Sejatinya, sejak kecil Ace sudah merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan dirinya secara lebih maskulin dibandingkan anak perempuan lain yang seusianya. Sebagai seorang anak kecil, pihak

keluarga meyakini bahwa semua ini hanya fase semata sehingga tidak mengindahkan bentuk-bentuk pengekspresian diri Ace. Namun, pada akhirnya keluarga Ace mulai mengajarkan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam⁵ ketika Ace mulai memasuki usia sekolah dasar. Pemilihan sekolah untuk Ace dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh kedua orang tua dan neneknya, karena itu sekolah dengan basis-basis agama Islam menjadi pilihan mutlak keluarga Ace.

“Yang paling *kocak*, aneh, intinya *nggak* jelaslah *tuh* mereka membesarkan saya sebagai cowok dan mengharapkan saya menyukai jadi cewek. *They literally raised me this way; dibeliin* mainan mobil-mobilan, robot. *Just like how they would raise a boy, a son*. Habis itu, mereka *masukin* saya sekolah Islam.” (Ace, 23 Desember 2023).

Terjemahan:

“Yang paling *kocak*, aneh, intinya *nggak* jelaslah *tuh* mereka membesarkan saya sebagai cowok dan mengharapkan saya menyukai jadi cewek. Mereka benar-benar membesarkan saya dengan cara ini; *dibeliin* mainan mobil-mobilan, robot. Sama seperti bagaimana mereka akan membesarkan seorang anak laki-laki. Habis itu, mereka *masukin* saya sekolah Islam.” (Ace, 23 Desember 2023).

Pada akhirnya, Ace mulai menyadari kuasa atas tubuhnya sendiri ketika memasuki usia remaja, dirinya mencoba membuat ‘kehidupan’⁶ lain di dunia maya untuk mengekspresikan identitas gender dan mengeksplorasi seksualitasnya. Kendati telah mengetahui siapa dan bagaimana dirinya ingin dilihat dan dianggap, Ace mengatakan bahwa dirinya masih terbelenggu oleh pihak keluarga. Maka dari itu, Ace tidak bisa mengekspresikan diri menuruti kemauannya sendiri dalam berperilaku jika hanya untuk meraih kebebasan berekspresi yang telah direnggut darinya.

“Sampai kisaran 10 tahun depan, *nggak* ada rencana buat *ngebawa* identitas ini ke *real life*. *Not until I grew myself away from here.*” (Ace, 5 Desember 2023).

Terjemahan:

“Sampai kisaran 10 tahun depan, *nggak* ada rencana buat *ngebawa* identitas ini ke kehidupan nyata. Tidak sampai saya tumbuh dan menjauh dari sini.” (Ace, 5 Desember 2023).

Merinci kepada kompleksitas dinamika antara non-biner selaku individu dan norma sosial yang mengontrol konsep identitas gender, ditemukan bahwa alienasi diri yang dijalankan oleh para non-biner tersebut lebih dari sekadar isu individual, melainkan juga representasi dari kecenderungan keterlibatan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial. Pengawasan dan kontrol sosial yang berlaku merupakan belenggu yang dapat menciptakan keterasingan seorang individu dari dirinya sendiri, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari alternatif lain dalam mengenali jati dirinya. Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan langsung dengan keharusan untuk tetap berada di dalam batasan norma untuk melindungi nama baik diri dan keluarga. Dengan demikian, edukasi terhadap identitas gender

⁵ Berpakaian yang menutup aurat dan berkerudung

⁶ Kehidupan alternatif

memainkan peran penting dalam menyokong kehidupan bermasyarakat yang lebih adil dan setara, di mana seorang individu dapat diterima sebagai manusia tanpa mengindahkan identitas gender maupun orientasi seksualnya

3.3. Narasi Pengawasan dan Pengetahuan Akan Kuasa Tubuh

Kami kerap kali menjumpai narasi-narasi serupa yang berbunyi “cowok tuh harusnya main bola, mana ada cowok main boneka,” dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Larangan tidak tertulis untuk tidak berperilaku menyimpang dari norma masyarakat, narasi yang selalu menempatkan individu sebagai salah satu dari dua dikotomi gender. Memanfaatkan situasi dan kondisi Indonesia yang masih berlandaskan heteronormativitas, penggunaan strategi komunikasi pengawasan yang membatasi individu dengan narasi yang memojokkan dan menuding sering kali berhasil menjadi kontrol tubuh seseorang. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai heteronormativitas selalu memandang dirinya sebagai orang yang ‘benar’ atau orang yang ‘seharusnya’, padahal tidak berada dalam spektrum gender biner bukan tolok ukur yang tepat bagi benar atau salah.

Secara historis, tubuh manusia selalu dikelilingi oleh kuasa yang membentuk batasan dan aturan semu atas tubuh seseorang. Selaras dengan hal tersebut, Foucault (1995) menggambarkan kerja panoptikon sebagai representasi dari tubuh yang selalu dihadapkan dengan pengawasan. Dengan demikian, terdapat kuasa di luar diri manusia yang mengawasi dan membatasi gerak tubuhnya. Selanjutnya, Foucault (1995) menyatakan bahwa kuasa yang mengatur masyarakat tradisional lebih bersifat individualistik, sedangkan dalam masyarakat modern berasal dari institusi. Disadari atau tidak, rumah dan sekolah termasuk ke dalam institusi yang turut berkontribusi menghasilkan aturan lewat narasi-narasi disipliner yang bersifat mengawasi dan membatasi.

Bartky (1990) menjelaskan keberadaan tubuh yang berada di dalam praktik pendisiplinan akan menjalin relasi antara tubuh dan ruang, atau disebut juga sebagai *the body's space*. Konsep *the body's space* merupakan bentuk dari relasi tubuh dan objek ketika berada di jangkauan kuasa institusi, yakni penyesuaian perilaku terhadap pembangunan relasi tubuh seseorang dengan suatu objek. Dalam konteks ini, *the body's space* dan *docile bodies* berada dalam posisi yang sejajar untuk diterapkan ketika individu perlu menyesuaikan perilakunya dengan heteronormativitas sebagai bentuk dari objek yang tidak kasat mata. Para non-biner perlu membangun relasi tetap dengan nilai-nilai heteronormativitas yang mengitari mereka, termasuk di dalamnya meliputi cara mereka melakukan penyesuaian dengan nilai dan norma tersebut. Maka dari itu, ketika nilai-nilai yang bersifat heteronormatif tidak lagi dominan, mereka turut mengubah perilakunya tanpa perlu membawa tindakan penyesuaian yang sebelumnya.

Kendati institusi juga mempunyai kuasa atas kontrol tubuh seorang individu, hal tersebut tidak lantas menjadikan seseorang selalu berada dalam kontrol di luar kendalinya. Seorang individu juga memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, walaupun tidak sebebaskan itu. Pengetahuan terhadap ranah mana

yang memperbolehkan dirinya untuk merangkul kembali jati dirinya secara terang-terangan merupakan bentuk atas kuasa tubuhnya sendiri, sebab individu mengetahui seperti apa dirinya perlu menyesuaikan perilaku dengan dirinya sendiri. Dengan memiliki kehidupan sekunder yang berbanding terbalik terhadap nilai dan norma heteronormatif, maka seorang non-biner dapat dikatakan tengah mencirikan bentuk kekuasaan dan kontrol atas dirinya sendiri di luar jangkauan institusi.

4. Simpulan

Keberadaan sistem gender biner dan nilai-nilai heteronormativitas masih berlaku di Indonesia karena turut disokong oleh ajaran-ajaran agama yang mengakar kuat, sehingga tercipta lingkungan sosial masyarakat yang resistan terhadap perbedaan dalam konteks identitas gender dan seksualitas. Hal tersebut lantas menjadi batasan bagi setiap genderqueer untuk dapat menunjukkan jati dirinya. Konsepsi-konsepsi konservatif yang langgeng eksistensinya di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tidak ayal menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tertentu merasa terlibat dalam kerangka sosial yang membelenggu dan merenggut kebebasannya dalam mengekspresikan jati dirinya.

Konsep *docile bodies* milik Foucault (1995) mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan suatu kuasa memengaruhi kepatuhan tubuh terhadap aturan-aturan yang ada, hal ini lantas memberikan gambaran mengenai kontrol sosial yang berperan serta dalam membentuk identitas maupun perilaku individu. Secara keseluruhan, realitas ini mengungkapkan kompleksitas dinamika sosial dan peran serta kekuasaan dalam lingkungan heteronormatif, di mana rasa malu menjadi landasan individu untuk patuh dan tunduk dengan norma yang ada karena takut dinilai buruk atau menerima penolakan dari masyarakat. Berkenaan dengan itu, kesadaran akan kuasa tubuhnya sendiri disadari oleh sejumlah kelompok yang termarginalisasi, hingga kemudian mencari tempat amannya tersendiri supaya mereka dapat merasakan kembali kebebasan berekspresi yang telah direnggut heteronormativitas. Oleh karena itu, fleksibilitas nilai dan norma yang berlaku di dunia maya menjadi latar belakang mengapa internet dipilih menjadi tempat berlabuh, sebab hanya di sana yang menawarkan kehidupan dengan kebebasan untuk menggambarkan diri dan membentuk identitas yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, & Triawan, R. 2008. *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?* Jakarta: Arus Pelangi.
- Bartky, S. L. 1990. *Femininity and Domination: Studies in The Phenomenology of Oppression*. New York: Routledge.
- Berkowitz, D., Manohar, N. N., & Tinkler, J. E. 2010. Walk Like a Man, Talk Like a Woman: Teaching The Social Construction of Gender. *Teaching Sociology*, 38(2), 132-143.
- Creswell, J. W. 2012. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Davies, S. G. (2010). *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and Queer Selves*. New York: Routledge.
- Davies, S. G. 2017. Pengaturan Seksualitas di Indonesia. Dalam L. R. Bennett, S. G. Davies, & I. M. Hidayana (Eds.), *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Representasi* (pp. 31–62). essay, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Fiani, C. N., & Han, H. J. 2018. Navigating Identity: Experiences of Binary and Non-Binary Transgender and Gender Non-Conforming (TGNC) Adults. *International Journal of Transgenderism*, 20(2-3), 181-194.
- Foucault, M. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. 1995. *Discipline and Punish*. New York: Vintage Books.
- Kartaningdryani, I. 2019. Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(2), 191-209.
- Nurohim, S. 2018. Identitas dan Peran Gender Pada Masyarakat Suku Bugis. *Sosietas*, 8(1), 457-461.
- Ortner, S. 1974. Is Female to Male as Nature is to Culture? *Woman, Culture, and Society*, 68- 87.
- Parker, L. 2009. Religion, Class and Schooled Sexuality Among Minangkabau Teenage Girls. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 165(1), 62-94.
- Richards, C., Bouman, W. P., Seal, L., Barker, M. J., Nieder, T. O., & T'Sjoen, G. 2016. Non-Binary or Genderqueer Genders. *International Review of Psychiatry*, 28(1), 95-102.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- West, C., & Zimmerman, D. H. 1987. Doing Gender. *Gender & Society* 1(2): 125-51.
- Wieringa, S. E. 2017. Perdebatan Diskursif Mengenai Interseks di Indonesia: Stigma, Hak Asasi, dan Identitas. Dalam L. R. Bennett, S. G. Davies, & I. M. Hidayana (Eds.), *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Representasi* (pp. 255-274). essay, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wospakrik, M. M. 2013. Gender dalam Perspektif Agama Kristen. *DINAMIS*, 2(12), 20-23.
- Zubeir, R. 2012. Gender Dalam Perspektif Islam. *An Nisa'a*, 7(2), 119-133.